

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.
- Citrawan, H. (2017). Analisis wacana hak asasi manusia dalam kebijakan koreksional Indonesia (Beyond Indonesian Correctional Policy). Legislasi Indonesia.
- Hiariei, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, R. (2018). Hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
- Komnas HAM. (2020). Laporan tahunan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
- Moleong, L. J. (2018). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2018). Hukum pidana Indonesia: Perspektif teori dan praktik. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (2016). Dasar-dasar hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (2016). Teori dan praktik pembedaan. [Penerbit tidak disebutkan].
- Sulaiman, A. (2019). Pengantar ilmu hukum. UIN Jakarta bersama YPPSDM.
- Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (2018). Industrial society and social welfare. Russell Sage Foundation.
- Yahman, & Tarigan, N. (2019). Peran advokat dalam sistem hukum nasional. Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi bagi Narapidana dan Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Syarat Administratif, Mekanisme Persetujuan, dan Pengawasan Pembantaran.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989.

United Nations. (2015). The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules). UN General Assembly.

World Medical Association. (1975). Declaration of Tokyo: Guidelines for physicians concerning torture and other cruel, inhuman or degrading treatment in relation to detention and imprisonment.

C. Jurnal Ilmiah

Afifah, F. S. W. (2024). Tujuan, fungsi, dan kedudukan hukum. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2.

Andriani, M. (2019). Pemenuhan hak kesehatan narapidana dalam perspektif HAM. Jurnal HAM, 10(1).

Atiqah, D. (2019). Peran hakim dalam mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan putusan. Pa Purwodadi.

Gunawan, F. (2021). Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Jurnal Hukum Pidana, 8(2).

Hidayat, R. (2020). Overcrowding lapas dan implikasinya terhadap pemenuhan hak dasar narapidana. Jurnal Penelitian Hukum, 15(2).

- Imanina, K. (2020). Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD*, 45–48.
- Kurniawan, A. (2022). Transparansi data pembantaran narapidana dalam perspektif akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2).
- Laksono, F. A. (2023). Pembantaran penahanan (stuiting) tersangka dalam perspektif hukum acara pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 5.
- Lestari, D. (2019). Implementasi pembantaran dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2).
- Lestari, N. (2020). Tantangan pemenuhan hak kesehatan narapidana di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2).
- Marzuki, P. M. (2017). Perlindungan HAM dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3).
- Prasetyo, T. (2020). Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Prasetyo, T. (2021). Keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(1).
- Rakian, J. J. S. T. Y. (2016). Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana. *Lex Crimen*, 5.
- Rahmawati, I. (2021). Kesehatan narapidana sebagai hak konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).

- Santoso, A. (2018). Hak-hak narapidana dalam perspektif hukum HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 10(2).
- Sari, R. (2020). Kebijakan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Simanjuntak, J. (2021). Analisis hak-hak narapidana dalam kerangka HAM. *Jurnal HAM*, 12(1).
- Simanjuntak, J. (2022). Problematika overcrowding dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(2).
- Simbolon, M. (2021). Rehabilitasi narapidana narkoba dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2).
- Susanto, H. (2020). Hambatan implementasi hak kesehatan narapidana melalui mekanisme pembantaran. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(1).
- Widodo, S. (2022). Kebijakan pemasyarakatan di era modern: Antara idealisme dan realitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Wijaya, P. (2020). Hak-hak konstitusional warga binaan dalam perspektif pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1).

D. Website/Online Sources

- Admin. (2021, 5 Agustus). Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Aotari, F. (2018, November). Pembantaran: Pemenuhan hak atas kesehatan tahanan. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Pedoman prosedur pembantaran narapidana dan tahanan. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Statistik pemasyarakatan tahun 2023. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- IDN Times. (2025, 11 April). Rutan Kelas I Jakarta Pusat berikan remisi Idulfitri pada 299 warga binaan. <https://www.idntimes.com>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2019). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2019.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2020). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2020.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2021). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2021.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2022). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2022.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2023). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2023.
- Media Indonesia. (2022, 14 Juni). 70 persen narapidana di Rutan Salemba terjerat kasus narkoba. <https://mediaindonesia.com>